JOMPA ABDI: Jurnal Pengabdian Masyarakat
https://jurnal.jomparnd.com/index.php/jpabdi
Vol. 4. No. 4 Desember 2025
e-ISSN: 2828-819X p-ISSN: 2828-8424

Klinik Pemajuan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan Berbasis Nilai Islam Melalui Materi Bahasa Arab Di Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus Putri

Yuangga Kurnia Yahya[1*], Farhah[2], Fadhillah Rachmawati[3], Nala Alfia Chusna[4], Umi Mahmudah[5], Samsul Ma'arif[6] , Corina Durra Sholiha[7], Siti Masitoh[8]
[1,2,3,4,5,7,8]Universitas Darussalam Gontor, Ponorogo
[6]Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
Email: yuangga4@unida.gontor.ac.id[1*]

Abstrak

Kegiatan yang bertajuk "Klinik Literasi KBB Berbasis Nilai Islam di Perguruan Tinggi Pesantren" ini merupakan klinik KBB yang diselenggarakan di pondok pesantren dan perguruan tinggi pesantren. Klinik ini berfokus pada pengenalan dan pembentukan perspektif (atau minimal awareness) terkait isu Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan (KBB) pada Mahasiswa/i Guru.Tujuan praktisnya memperkenalkan isu KBB pada Mahasiswa/i Guru dan memberikan awareness akan pelanggaran KBB dalam konteks Indonesia yang masih banyak ditemui. Realisasi program pengabdian ini dimulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan tahap evaluasi dan refleksi dengan memanfaatkan berbagai metode dan integrasi dengan mata kuliah "Bahasa Arab lil Qira'ah wa al-Kitabah". Dalam pelaksanaannya, program ini terbagi ke dalam program formal di dalam kelas dan program non-formal di luar kelas. Kegiatan formal di dalam kelas meliputi sesi dalam mata kuliah tertentu dan dalam bentuk workshop. Adapun kegiatan non-formal di luar kelas dilaksanakan dalam bentuk kajian rutin setelah sholat maghrib. Di berbagai program tersebut, tim pengabdi menyajikan pembelajaran seputar isu KBB dengan berbagai metode yang menarik, mulai dari membuat peta opini, studi kasus, menonton video, melakukan kajian ayat al-Qur'an, hingga bermain peran untuk merefleksikan bentuk-bentuk pelanggaran KBB dalam kehidupan sehari-hari. Program-program tersebut diadakan dalam rangka memberikan wawasan dan kompetensi yang dikemas dalam suasana belajar baru yang berbeda dengan suasana belajar di kelas. Nuansa baru ini diperkenalkan dalam rangka merangsang minat dan kepekaan para guru pondok pesantren dalam memandang isu-isu KBB, khususnya dalam konteks Indonesia.

Keywords: *KBB, Literasi, Minoritas, Pelanggaran, Pondok pesantren*

PENDAHULUAN

Diskusi seputar Hak Asasi Manusia (HAM) tidak dapat dilepaskan dari isu Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan (KBB), yang merupakan salah satu bentuk kebebasan individu. Namun dalam praktiknya, pelanggaran akan KBB masih sangat tinggi di berbagai negara. Di Indonesia, angka pelanggaran ini masih mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data dari Setara Institute, pada 2024 terjadi 204 peristiwa pelanggaran KBB di Indonesia atau naik 19,82% bila dibandingkan dengan 217 peristiwa yang terjadi pada 2023(Setara Institute, 2025). Meskipun demikian, isu-isu KBB nampaknya belum menjadi isu arus utama dalam berbagai kebijakan pemerintah dan juga kajian, diskusi, atau gerakan di berbagai lapisan masyarakat. KBB yang merupakan *forum internum* individu yang tidak bisa ditunda, dikurangi, maupun dibatasi pemenuhannya, seringkali belum terjamin secara utuh. Negara dalam hal ini memiliki kewajiban untuk menghormati dan melindungi hak tersebut, termasuk mencegah terjadinya pelanggaran, memberikan tindakan yang tepat pada

pelanggaran, dan pemulihan atas pelanggaran yang terjadi (Bagir et al., 2014; Hasse et al., 2011).

Oleh karena itu, perlu upaya-upaya pengarusutamaan isu KBB dalam berbagai forum dan ruang akademik. Hal ini dimaksudkan agar lebih banyak akademisi dari berbagai latar belakang keilmuan yang memiliki wawasan dan kepekaan pada isu ini dan turut memberikan kontribusi teoritis dan praktis pada isu ini. Salah satu upaya tersebut adalah kegiatan klinik KBB. Klinik KBB merupakan program yang dirancang sebagai bentuk pemajuan advokasi KBB melalui jalur pendidikan, khususnya bagi peserta yang berperan sebagai dosen. Menggunakan model *experiential learning*, program ini menempatkan mahasiswa untuk belajar langsung dari pengalaman berinteraksi dengan individu atau komunitas sekaligus terlibat secara nyata dalam menangani isu-isu yang mereka hadapi. Klinik KBB memadukan berbagai pendekatan untuk mengembangkan wacana KBB di Indonesia, memperkuat kolaborasi, dan mendorong keterlibatan langsung dalam penguatan komunitas. Harapannya, peserta mampu merancang program yang relevan dengan kebutuhan lokal, dan mampu mengimplementasikannya di lingkungan kampus masing-masing (Tsani, 2025). Dari tujuan tersebut, kegiatan yang bertajuk "Klinik Literasi KBB Berbasis Nilai Islam di Perguruan Tinggi Pesantren" ini merupakan klinik KBB yang diselenggarakan di pondok pesantren dan perguruan tinggi pesantren. Klinik ini berfokus pada pengenalan dan pembentukan perspektif (atau minimal *awareness*) terkait Isu KBB pada Mahasiswa/i Guru.Tujuan praktisnya memperkenalkan isu KBB pada Mahasiswa/i Guru dan memberikan *awareness* akan pelanggaran KBB dalam konteks Indonesia.

Pemilihan pondok pesantren sebagai tempat kegiatan bukan tanpa alasan. Mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim, dan seringkali yang melakukan pelanggaran atau pembenaran atas pelanggaran KBB adalah masyarakat muslim selaku mayoritas (Nainggolan et al., 2009; USCIRF, 2019). Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan yang mandiri dan independen berbasis Islam. Lembaga ini bertujuan untuk menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderta, dan nilai luhur bangsa lainnya (Pemerintah Pusat Indonesia, 2019). Oleh karenanya, perlu memperkenalkan isu KBB di lingkungan pesantren sebagai bentuk upaya melahirkan pemimpin-pemimpin masa depan yang memiliki perhatian pada pemenuhan KBB. Kegiatan ini dilaksanakan di Pondok Modern Darussalam Gontor, dengan peserta guru pengajar *Kulliyatul Mua'allimin al-Islamiyyah* (KMI) yang juga merupakan mahasiswa aktif Universitas Darussalam Gontor. Pola pendidikan yang diterapkan dalam pondok ini merupakan sebuah desain konstruksi karakter santri-santri di dalamnya yang sudah eksis dan teruji selama hampir satu abad menjadi pertimbangan penting memperkenalkan isu ini kepada para guru-guru di pondok tersebut (Budi & Apud, 2019; Ritonga et al., 2024). Basis ini yang dianggap tim pengabdi sebagai sebuah keunggulan dan nilai positif untuk memperkenalkan isu-isu KBB dan

menanamkan kepekaan pada isu ini, baik untuk diri mereka sendiri maupun disebarluaskan pada santriwati-santriwati yang mereka ajar di kelas.

METODE KEGIATAN

Kegiatan pengabdian ini pada dasarnya adalah sebagai alternatif pemecahan masalah isu strategis secara riil di lapangan, sehingga program yang diadakan adalah kegiatan-kegiatan yang ditujukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Realisasi program pengabdian ini dimulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan tahap evaluasi dan laporan. Kegiatan ini masuk dalam rentetan kegiatan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Fellowship KBB dari CRCS UGM yang dilaksanakan 5 kali dalam kurun Oktober – November 2025 di Pondok Modern Darussalam Gontor Putri, Mantingan, Ngawi, Jawa Timur.

Tahap persiapan meliputi survei lapangan. Survei dilakukan tiga minggu sebelum penyelenggaran kegiatan. Hal yang disurvei adalah situasi pondok pesantren dan mahasiswa yang akan terlibat, dan juga kegiatan pondok pesantren yang sedang berjalan.. Selain itu, di tahap ini, tim pengabdi berkoordinasi dengan dosen pembimbing akademik, dosen pengampu materi Islamisasi Ilmu Pengetahuan Kontemporer, dan dosen pengampu materi Bahasa Arab terkait rencana kegiatan. Tahap pelaksanaan adalah pendampingan program literasi dengan bentuk kuliah, workshop, dan kajian non-formal. Kegiatan pendampingan dilaksanakan pada waktu-waktu yang sudah disepakati dengan mahasiswi dan dosen pembimbing akademik dan pembimbing asrama. Tahap terakhir adalah evaluasi kegiatan antara tim pengabdi serta penyusunan laporan pengabdian. Program ini berfokus pada dua hal utama, yaitu memperkenalkan isu KBB pada guru dan memberikan *awareness* akan pelanggaran KBB dalam konteks Indonesia**.**

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini memanfaatkan dan menerapkan hasil workshop Fellowship KBB yang diselenggarakan oleh Program Studi Agama dan Lintas Budaya (*The Center for Religious and Cross-Cultural Studies/CRCS*) Universitas Gadjah Mada pada bulan Mei hingga Agustus 2025. Di samping itu, kegiatan ini juga memanfaatkan Modul Pendidikan KBB yang telah disusun oleh alumni Fellowship KBB yang tergabung dalam ISFoRB (*Indonesian Scholar Network on Religious Freedom or Beliefs*) . Namun dalam pelaksanaannya, tim pengabdi melakukan beberapa penyesuaian dengan konteks peserta klinik dan juga tujuan klinik ini dengan tetap berpegang pada prinsip KBB. Prinsip yang dimaksud adalah menghadirkan pendidikan dan pengajaran KBB yang mampu membenztuk kepekaan dan nalar kritis publik dalam melihat kompleksitas persoalan KBB, serta membangun kesadaran publik untuk menghormati dan menjunjung tinggi prinsip kebebasan memeluk agama atau keyakinan tertentu (Asfinawati et al., 2024, v).

Program klinik yang dilaksanakan di PMDG Kampus Putri ini dilaksanakan dalam dua kegiatan utama, yaitu kegiatan formal di dalam kelas dan kegiatan non-formal di luar kelas.

Kegiatan formal di dalam kelas meliputi sesi dalam mata kuliah tertentu dan dalam bentuk workshop. Adapun kegiatan non-formal di luar kelas dilaksanakan dalam bentuk kajian rutin setelah sholat maghrib. Kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh ustadzah pengajar KMI yang juga merupakan mahasiswa program Studi Agama-Agama kelas C, yang berjumlah sebanyak 30 orang. Para peserta tersebut berasal dari latar belakang budaya dan organisasi kemasyarakatan yang beragam, yang juga berperan sebagai guru bagi santriwati di kelas menengah dan tinggal di dalam satu kampus. Keunggulan diversitas ini diharapkan dapat memberikan perspektif yang kaya dalam proses klinik dan pasca klinik, dapat mengajarkan dan menyebarkan prinsip-prinsip KBB ke berbagai lapisan masyarakat, khususnya di tempat mereka mengajar sebagai guru dan mengabdi sebagai anggota masyarakat atau organisasi (Choliq et al., 2024).

Dalam program awal, tim pengabdi perlu membuat peta opini untuk menemukan *baseline* pengetahuan dan sikap para peserta terhadap isu-isu KBB. Di tahap ini, tim pengabdi memberikan 6 pertanyaan untuk melihat pandangan para peserta tentang isu KBB. Isu Ahmadiyah dan Syiah dipilih sebagai pengantar menuju hubungan antar agama. Di samping itu, kedua kelompok minoritas tersebut juga merupakan minoritas yang paling sering mendapatkan persekusi dan menjadi korban pelanggaran KBB di Indonesia (Hasan, 2017; Setara Institute, 2025). Pertanyaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Apakah anda setuju dengan aqidah Ahmadiyyah?
2. Apakah anda setuju dengan aqidah Syiah?
3. Apakah anda setuju mereka tinggal di lingkungan yang sama dengan anda?
4. Apakah anda setuju mengusir mereka dari lingkungan tempat anda tinggal?
5. Apakah anda setuju mereka melaksanakan kegiatan ibadah secara internal di rumah mereka?
6. Apakah anda setuju jika mereka membangun rumah ibadah?

Keseluruhan pertanyaan tersebut hanya perlu dijawab dengan jawaban “SETUJU” atau “TIDAK SETUJU”. Masing-masing peserta diminta untuk menjawab seluruh pertanyaan dengan menuliskannya di *sticky notes* yang dibagikan oleh tim pengabdi. Setelah menjawab, mereka diminta menempelkan *sticky notes* yang berisi jawaban di ujung meja agar dapat terlihat oleh fasilitator dan peserta tidak dapat mengganti jawabannya ketika sesi tanya-jawab. Tahap ini merupakan tahap penting bagi para peserta dan fasilitator untuk menemukan arah berangkatnya diskusi dan model klinik yang memudahkan kedua belah pihak. Lebih penting lagi, fasilitator memiliki gambaran yang lebih jelas seberapa jauh tujuan yang akan dicapai dan seberapa besar usaha yang perlu dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut dengan modal pengetahuan dan sikap yang ada.



Gambar 1. Peserta menjawab soal *pre-test* terkait wawasan awal peserta pada isu KBB

Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, seluruh peserta sepakat menjawab "TIDAK SETUJU" pada pertanyaan pertama dan kedua. Jawaban tersebut berdasarkan pengetahuan mereka dalam mata pelajaran "*al-Adyan*" (Studi Perbandingan Agama) yang didapat di jenjang sekolah menengah dan mata kuliah "*Ilm Kalam*" (ilmu teologi Islam) yang merupakan mata kuliah wajib di semester 2. Dalam kedua materi tersebut, isu tentang Syiah dan Ahmadiyah dikategorikan sebagai golongan atau aliran yang menyimpang, yang dikenal juga sebagai "*al-Madzahib al-Haddamah*". Pada sesi konfirmasi, beberapa peserta memberikan pendapat bahwa alasan mereka tidak setuju dengan kedua aliran tersebut adalah dikarenakan perbedaan teologis yang mendasar, seperti isu kenabian, isu imamah, dan kegiatan peribadatan wajib. Hal itulah yang membuat mereka sepakat menjawab "TIDAK SETUJU" pada kedua aliran tersebut.

Berdasarkan pertanyaan ketiga, sebanyak 40% dari total peserta yang menjawab "TIDAK SETUJU" dan 60% menjawab "SETUJU". Mereka yang tidak setuju memberikan beragam alasan. Di antara alasan yang paling banyak adalah kekhawatiran mereka bahwa kelompok tersebut akan menyebarkan ajaran yang menyimpang dari ajaran Islam arus utama dan pada saatnya, mempengaruhi masyarakat muslim untuk mempelajari ajaran yang menyimpang tersebut. Jikalau tidak melakukan konversi, ditakutkan masyarakat muslim di daerah tersebut mengalami kebingungan dalam mempraktikkan ajaran agamanya secara benar dan sesuai syariat. Adapun peserta yang memberikan pendapat "SETUJU" beralasan bahwa perjumpaan mereka dalam satu lingkungan merupakan sebuah keniscayaan karena tinggal di Indonesia yang dihuni berbagai macam pemeluk agama dan etnis. Mereka menganggap bahwa dengan mereka tinggal di lingkungan yang sama, tidak serta merta membuat masyarakat muslim dapat konversi aliran tersebut.

Namun uniknya, dari hasil pertanyaan ketiga tadi, tidak berbanding lurus dengan pertanyaan keempat. Hanya 3,33% (1 orang) dari keseluruhan peserta yang menjawab "SETUJU" untuk mengusir mereka dari lingkungan tempat mereka tinggal. Dalam wawancara lebih lanjut, peserta yang menjawab "SETUJU" memiliki pandangan bahwa keberadaan Ahmadiyyah dan Syiah di lingkungan yang sama dengan mereka memiliki potensi untuk menyebarkan ajaran mereka dan membuat masyarakat lainnya, khususnya masyarakat muslim merasa terganggu dalam menjalankan keyakinannya. Adapun pandangan peserta yang menjawab "TIDAK SETUJU" memiliki pandangan bahwa ketidaksetujuan mereka dengan aqidah dan kepercayaan sekelompok golongan tidak serta merta membuat

mereka memiliki hak untuk mengusir mereka dari lingkungan tersebut. Tidak sedikit dari peserta juga berpandangan bahwa kelompok Ahmadiyah dan Syi'ah juga memiliki hak untuk tinggal di kawasan tersebut, sepanjang tidak ada persoalan administratif terkait kependudukan dan tempat tinggal.



Gambar 2. Wawancara dengan peserta terkait jawaban mereka dalam *pre-test*

Adapun di pertanyaan kelima, seluruhnya sepakat menjawab "SETUJU". Jawaban ini juga menunjukkan fakta yang menarik, di mana seluruh peserta yang beragama Islam dan memiliki latar belakang pendidikan pesantren, merasa bahwa pelaksanaan kegiatan ibadah bersama oleh kelompok Ahmadiyah atau Syi'ah di rumah mereka tidak menimbulkan masalah dan menganggu ketenangan dan ketertiban publik. Para peserta berpandangan bahwa selama ibadah tersebut dilaksanakan secara eksklusif di rumah mereka, maka hal tersebut diperbolehkan, sepanjang telah memiliki ijin secara administratif di lingkungan tersebut. Bahkan, tidak sedikit yang berpandangan bahwa penyelenggaraan kegiatan ibadah dengan menggunakan pengeras suara dan terop di depan rumah salah satu pemeluknya, selama memperhatikan jam belajar dan jam istirahat masyarakat di lingkungan tersebut.

Terakhir, terdapat beberapa perbedaan dalam isu pembangunan rumah ibadah. Sebanyak 66,66% peserta menjawab "TIDAK SETUJU", dan sisanya menjawab "SETUJU". Peserta yang menjawab "TIDAK SETUJU" memiliki pandangan bahwa pendirian rumah ibadah menunjukkan eksistensi dari masyarakat pemeluk Ahmadiyah atau Syi'ah di lingkungan tersebut. Hal ini dianggap mampu menarik warga muslim lainnya untuk konversi ke kedua ajaran yang dianggap menyimpang tersebut. Selain itu, adanya rumah ibadah khusus bagi keduanya akan berpotensi menghadirkan anggota komunitas Ahmadiyah dan Syi'ah lainnya yang berasal dari luar lingkungan tersebut dan membuat lebih banyak interaksi sesama komunitas tersebut dan membuat mereka semakin kuat secara kelembagaan, dan memungkinkan mempengaruhi komunitas muslim yang berada di lingkungan tersebut. Adapun peserta yang menjawab "SETUJU" memiliki pandangan bahwa pendirian rumah ibadah adalah hak mereka agar dapat menunaikan ibadah sebagaimana mestinya. Hal tersebut sebagaimana juga diinginkan oleh pemeluk agama lainnya, termasuk muslim yang membutuhkan pembangunan rumah ibadah.

Setelah sesi pertama tersebut, tim pengabdi mengidentifikasi bahwa pengetahuan dan sikap dasar peserta terhadap isu KBB sudah cukup baik. Hal tersebut terlihat dari bagaimana sikap mereka dalam berinteraksi secara sosial dengan pemeluk Ahmadiyah dan Syi'ah. Selain itu, mereka juga mengamini adanya hak-hak dasar seseorang untuk menganut agama,

mempraktikkannya, memiliki rumah ibadah, dan juga hak untuk memiliki tempat tinggal. Dari sini, *baseline* yang dimiliki peserta sudah memiliki kepekaan dan kecenderungan positif dalam melihat isu-isu KBB, sehingga lebih mudah untuk tim pengabdi memberikan pelatihan yang lebih intensif terkait hal tersebut.

Setelah membuat peta opini, tim pengabdi melakukan *brainstorming*. Di sesi ini, peserta akan diberikan berita-berita terkait pelanggaran KBB di Indonesia dalam kurun waktu 20 tahun belakangan. Di awal, fasilitator memberikan berita tentang pembakaran masjid di Tolikara pada 2015 dan genosida Israel di Palestina. Dari kedua berita tersebut, fasilitator meminta beberapa peserta untuk memberikan pandangannya terkait kedua peristiwa kemanusiaan tersebut. Mereka memberikan jawaban yang beragam, tetapi berkisar pada rasa sedih, kesal, dan marah melihat peristiwa pembakaran dan perusakan tempat ibadah. Setelah itu, fasilitator memperlihatkan foto dan berita seputar pengusiran Syi'ah di Sampang pada 2012, penyerangan Ahmadiyah di Lombok pada 2018, pembakaran 8 vihara di Tanjung Balai pada 2016, persekusi pada mahasiswa Katolik yang melakukan doa bersama di Pamulang pada akhir 2024, dan perusakan rumah doa di Padang pada 2025. Berbagai berita dan foto yang menyertainya menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap hak kebebasan beragama atau berkeyakinan di Indonesia masih tinggi. Fasilitator juga menunjukkan laporan Setara Institute yang menunjukkan tren pelanggaran KBB juga semakin meningkat di tahun 2024 dari tahun sebelumnya (Setara Institute, 2025).



Gambar 3. *Brainstorming* menggunakan metode *experiental learning* melihat kasus pelanggaran KBB di Indonesia

Setelah melihat seluruh berita dan foto yang berkaitan dengan pelanggaran KBB di Indonesia, fasilitator meminta seluruh peserta menuliskan dua hal yang mereka rasakan setelah melihat materi tersebut. Jawaban "marah", "kesal", "kecewa", "miris", dan "sedih" merupakan jawaban mayoritas dari peserta. Fasilitator kemudian meminta beberapa peserta untuk menjelaskan alasan di balik jawaban mereka. Salah seorang peserta menjawab bahwa tindakan dan peristiwa yang terjadi tersebut membuatnya sedih dan marah, karena mayoritas pelakunya adalah muslim. Justru dengan tindakan-tindakan yang ada, mereka tidak menunjukkan nilai-nilai Islam. Peserta lainnya juga mengamini hal tersebut. Ia merasa sedih dan kecewa melihat berbagai berita tersebut. Menurut pengakuannya, selama ini ia tinggal di dalam pondok dan mendapatkan akses berita yang minim tentang pelanggaran KBB di Indonesia. Setelah melihat berbagai berita tersebut, ia merasa bahwa ternyata hak-hak KBB dari kelompok muslim minoritas (Syiah dan Ahmadiyah) masih seringkali tercederai. Bahkan, apa yang dialami kelompok non-muslim juga tidak kalah mengenaskan, di mana

dalam kasus pembubaran mahasiswa Katolik di Pamulang, juga terjadi kekerasan fisik atas mahasiswa yang menjalankan ibadah mereka secara internal. Sesi pertama tersebut berisi brainstorming dengan metode *Experiential Learning/Case Study*.



Gambar 4. Peserta memberikan pendapat setelah melihat berita dan foto pelanggaran KBB

Untuk menghindari kejenuhan para peserta, sesi selanjutnya dilaksanakan dalam bentuk informal, yaitu berupa kajian yang bersifat santai. Para peserta diajak sholat Maghrib berjama'ah dan makan bersama. Setelah itu, diadakan kajian keagamaan bersama fasilitator dengan membahas kandungan dan tafsir dari Surah al-Maidah ayat 8. Ayat ini merupakan ayat yang sering dibahas dalam diskusi seputar keadilan sosial dan integritas, yang memberikan tuntunan agar umat islam berlaku adil, tidak hanya kepada sesama umat islam, tetapi juga kepada siapa saja walaupun kepada orang-orang yang tidak disukai. Di dalamnya, orang-orang yang beriman diperintahkan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Bahkan, jangan sampai kebencian terhadap suatu kaum, baik orang kafir maupun siapa pun, membuat seseorang berlaku tidak adil kepada mereka (Dinningrum & Dahliana, 2025). Pemilihan kajian ayat ini berkaitan erat dengan isu-isu pelanggaran KBB. Fasilitator memilih ayat ini sebagai refleksi bersama bagaimana perintah Allah dalam al-Qur'an yang melarang seorang muslim untuk berlaku tidak adil atau dhalim, bahkan terhadap masyarakat yang dibenci, yang tidak sepaham, dan juga yang kafir. Berbagai isu-isu pelanggaran KBB seringkali didasari oleh rasa kebencian, ketidaksukaan, dan ketakutan akan hadirnya masyarakat pemeluk agama lain atau aliran yang dianggap menyimpang. Karenanya, berbagai hal tersebut menjadi justifikasi bagi sekelompok masyarakat mayoritas untuk melakukan tindakan tidak adil, perusakan, dan persekusi terhadap kelompok-kelompok minoritas dan kelompok rentan (Khoiri & Windariana, 2019). Kajian tersebut juga mempertegas posisi ajaran agama Islam dalam hubungannya dengan masyarakat lainnya, yang tetap mengedepankan keadilan dan pemenuhan hak-hak masing-masing individu dan kelompok masyarakat yang tidak diskriminatif (al-Qardhawi, 1992; Aravik, 2018).



Gambar 5. Kajian Tafsir Surah *Al-Maidah* ayat 8 sebagai landasan teologis KBB dalam al-Qur'an



Gambar 6. Para peserta antusias dalam mengikuti kajian setelah sholat Maghrib

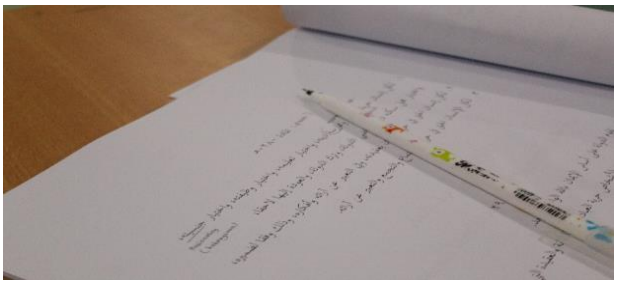
Setelah diberikan pengantar berupa fakta-fakta pelanggaran KBB di Indonesia dan ajaran Islam tentang pengelolaan keragaman, sesi yang selanjutnya mulai membahas secara intensif dokumen-dokumen Hak Asasi Manusia (HAM), khususnya dalam isu KBB. Fokus utama perhatian HAM adalah kemanusiaan dan tidak bertujuan menyerang identitas agama, keyakinan, ras, warna kulit, dan identitas lainnya. Tugas utama HAM melindungi manusia dari berbagai perbedaan identitas. Dalam kasus pelanggaran KBB, HAM tidak sedang melindungi identitas korban, baik identitas keagamaan, identitas ras, maupun identitas lainnya, melainkan melindungi korban sebagai manusia (Cholil, 2023). Oleh karena itu, sesi ini mencoba memperkenalkan isu KBB yang termaktub dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Namun, sebelum membaca kedua dokumen tersebut, fasilitator lebih dahulu memulai dengan landasan konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, khususnya pasal 28 E dan pasal 29 yang menyinggung isu KBB bagi seluruh warga negara Indonesia. Selain dokumen-dokumen di atas, sesi ini juga dilengkapi dengan dokumen-dokumen HAM yang dirumuskan oleh negara-negara berpenduduk mayoritas muslim, yaitu *The Universal Islamic Declaration of Human Right* (UIDHR) dan *The Cairo Declaration on Human Rights in Islam* (CDHRI).



Gambar 7. Cover buku ajar berisi dokumen HAM tentang KBB dalam bahasa Arab

Sesi ini merupakan sesi yang terintegrasi dengan mata kuliah "Bahasa Arab *al-Qira'ah wa al-Kitabah*" (Bahasa Arab untuk keterampilan Membaca dan Menulis), yang merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 2 di Universitas Darussalam Gontor. Seluruh peserta yang merupakan mahasiswi guru juga diwajibkan mengambil dan lulus mata kuliah ini. Oleh karena itu, tim fasilitator menggunakan dokumen-dokumen berbahasa Arab yang telah dikompilasi sebagai bahan ajar di materi tersebut. Kegiatan ini dilaksanakan dalam tiga pertemuan di dalam kelas.

Vol. 4. No. 4 Desember 2025
e-ISSN: 2828-819X p-ISSN: 2828-8424



Gambar 8. Catatan peserta dalam materi pembelajaran Bahasa Arab *al-Qira'ah wa Kitabah*

Proses pembelajaran dilakukan sebagai langkah-langkah pembelajaran keterampilan membaca (qira'ah/reading). Di awal, peserta akan diperkenalkan dengan kata-kata sulit (al-mufradat) yang terkandung dalam teks tersebut. Beberapa kata akan diletakkan dalam konteksnya yang sesuai agar pesan dan makna yang dimaksud dalam teks bacaan menjadi lebih tepat. Setelah perkenalan pada kata-kata sulit, fasilitator akan memilih peserta secara acak untuk membaca teks di tiap-tiap pasal. Setelah meminta beberapa peserta untuk membaca, fasilitator mengoreksi apabila ada kesalahan baca atau penyebutan tanda baca dari teks tersebut. Dalam mengoreksi bacaan, fasilitator juga menjelaskan letak kesalahan dan bagaimana bacaan yang benar, sesuai dengan struktur kalimat dan kaidah bahasa Arab yang berlaku. Kegiatan dilanjutkan dengan penjelasan dari peserta tentang teks yang ia baca dan umpan balik dari peserta lainnya terhadap hasil penjelasan tersebut. Di akhir, fasilitator kemudian memberikan kesimpulan dari berbagai hasil bacaan, sesuai dengan dokumen yang dibaca tersebut.



Gambar 9. Fasilitator memberikan penjelasan isi dokumen HAM dalam bahan ajar

Dalam menyimpulkan, fasilitator memberikan kaitan dari hasil bacaan pada teori dan pedoman bagaimana hak asasi manusia, khususnya hak kebebasan beragama atau berkeyakinan dijamin oleh konstitusi, baik di level nasional maupun global. Mereka juga diajak untuk membandingkan bagaimana organisasi negara-negara muslim juga membuat dokumen kesepakatan yang berfokus pada implementasi nilai-nilai HAM dan dalam rangka melindungi manusia. Peserta juga diajak untuk berpikir kritis dengan melihat bagaimana perlindungan kebebasan beragama atau berkeyakinan ditetapkan dalam dokumen berkekuatan hukum (UUD 1945), tetapi justru implementasi di masyarakat justru tidak sesuai dan bahkan berlawanan. Hak-hak kebebasan beragama dan beribadah bagi pemeluknya juga merupakan isu yang secara eksplisit disebutkan di dalam dokumen-dokumen HAM berbasis Islam seperti CDHRI dan UIDHR.

Di akhir sesi membaca dokumen, peserta akan mendapatkan dua aktivitas lain di samping membaca dokumen. Pertama, peserta akan diajak menonton video dokumenter yang berisi wawancara dengan masyarakat Ahmadiyah dan Syi'ah yang menjadi korban pengusiran dan persekusi di Indonesia. Video dokumenter tersebut diambil dari platform YouTube, yang berjudul "**J**adi Ahmadiyah: Harta Dijarah & Rumah Dibakar Delapan Kali | Reality Bites" diunggah oleh kanal "Narasi Newsroom" pada "13 Desember 2022"(Narasi Newsroom, 2022) dan video berjudul "Pemeluk Syiah asal Sampang: Di antara pilihan iman dan harapan pulang - BBC News Indonesia" diunggah oleh kanal "BBC News Indonesia" pada "4 November 2020" (BBC News Indonesia, 2020). Kedua video tersebut dipilih karena menceritakan peristiwa penyerangan dan persekusi dari perpspektif korban dan berbagai diskriminasi yang mereka dapatkan sebelum dan pasca peristiwa penyerangan dan persekusi tersebut. Perspektif dari korban ini menjadi hal penting dalam kegiatan ini, karena seringkali informasi yang sampai kepada masyarakat luas adalah narasi yang dibuat oleh kelompok mayoritas dan pelaku, sehingga banyak informasi dan kenyataan yang ditutup-tutupi (Huda, 2022; Madung, 2005).



Gambar 10. Para peserta menonton film dokumenter dan wawancara dalam kasus penyerangan Syiah di Sampang

Pasca menonton kedua video tersebut, fasilitator meminta peserta untuk melakukan analisis sederhana terkait aktor yang terkait dalam pelanggaran KBB tersebut. Untuk membantu peserta dalam analisis, fasilitator juga menayangkan kembali foto dan berita terkait pelanggaran KBB di Indonesia. Berdasarkan hasil analisis sederhana, para peserta mencoba melihat aktor-aktor yang terlibat dan menyimpulkan bahwa pelanggaran KBB tidak lahir dari faktor tunggal. Kompleksitas tersebut terlihat dari adanya "masyarakat mayoritas", "pemuka agama", "anggota jama'ah", "pemimpin daerah", dan "aparat". Hal-hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat aktor negara dan aktor non-negara yang terlibat dalam lahirnya diskriminasi dan persekusi pada sekelompok masyarakat.



Gambar 11. Peserta berdiskusi untuk menentukan sikap dan kebijakan dalam *role play*

Untuk lebih memahami hal tersebut, peserta diajak untuk bermain peran (*role play*). Peserta dibagi ke dalam empat kelompok. Masing-masing kelompok memiliki tugas peran yang sama, yaitu seorang pemimpin daerah, yang sedang menerima proposal pendirian gereja di desa mayoritas muslim. Di lain sisi, terdapat sekelompok masyarakat muslim yang melakukan demonstrasi penolakan pendirian rumah ibadah tersebut. Tiap kelompok diminta untuk memberikan sikap terhadap kasus tersebut, dilengkapi dengan sumber hukum atau sumber kebijakan dari sikap atau keputusan tersebut. Tiap-tiap kelompok diberi waktu 10 menit untuk diskusi dan 3 menit untuk memaparkan hasil diskusi.



Gambar 11. Perwakilan tiap kelompok memaparkan hasil diskusi dalam *role play*

Para peserta menunjukkan antusiasme tinggi dalam kegiatan ini. Dalam pemaparannya, beberapa kelompok sudah menggunakan landasan hukum seperti UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Peraturan Tiga Menteri No. 9 tahun 2006, dan juga UUD 1945 sebagai landasan pengambilan sikap atau kebijakan. Selain itu, terdapat pula kelompok yang menggunakan ayat al-Qur'an dan ajaran Islam sebagai sumber hukum dan kebijakan. Dari berbagai sumber dan landasan kebijakan tersebut, seluruh kelompok menekankan pada pemenuhan KBB bagi kelompok minoritas dan mengedepankan musyawarah antara masyarakat yang memohon pembangunan gereja dengan masyarakat yang menolak untuk menemukan solusi bersama. Hal ini menunjukkan bahwa para peserta mampu menangkap isu-isu utama dalam pemenuhan dan pelanggaran KBB serta menentukan sikap dalam isu-isu tersebut. Tugas terakhir tersebut juga menunjukkan refleksi peserta yang positif terhadap kegiatan klinik literasi KBB ini dan diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemajuan KBB di Indonesia

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian ini memiliki sasaran meningkatkan literasi tentang isu KBB di pondok pesantren. Kegiatan ini menyasar guru-guru pengajar di pondok pesantren yang juga merupakan mahasiswa program studi Studi Agama-Agama sebagai bentuk pengayaan wawasan seputar isu-isu sensitif dalam hubungan antar agama di Indonesia. Dalam pelaksanaannya, program ini terbagi ke dalam program formal di dalam kelas dan program non-formal di luar kelas. Kegiatan formal di dalam kelas meliputi sesi dalam mata kuliah tertentu dan dalam bentuk workshop. Adapun kegiatan non-formal di luar kelas dilaksanakan dalam bentuk kajian rutin setelah sholat maghrib. Di berbagai program tersebut, tim pengabdi menyajikan pembelajaran seputar isu KBB dengan berbagai metode yang menarik, mulai dari

membuat peta opini, studi kasus, menonton video, melakukan kajian ayat al-Qur'an, hingga bermain peran untuk merefleksikan bentuk-bentuk pelanggaran KBB dalam kehidupan sehari-hari. Program-program tersebut diadakan dalam rangka memberikan wawasan dan kompetensi yang dikemas dalam suasana belajar baru yang berbeda dengan suasana belajar di kelas. Nuansa baru ini diperkenalkan dalam rangka merangsang minat dan kepekaan (awareness) para guru pondok pesantren dalam memandang isu-isu KBB, khususnya dalam konteks Indonesia

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Ushuluddin UNIDA Gontor dan CRCS yang telah memfasilitasi dan memberikan dukungan finansial untuk pelaksanaan kegiatan ini. Terima kasih juga disampaikan kepada Pondok Modern Darussalam Gontor Putri kampus 1, 2, dan 3 selaku mitra kerjasama.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qardhawi, Y. (1992). *Ghair al-Muslimin fi al-Mujtama' al-Islamy* (3rd ed.). Maktabah Wahbah.

Aravik, H. (2018). Hak Minoritas Dalam Konteks Islam. *Mizan: Journal of Islamic Law*, *5*(1), 63–78.

Asfinawati, Hurriyah, Saraswati, N., Putri, N. S., Arianingtyas, R., Maarif, S., Cholil, S., Febriandi, Y., & Bagir, Z. A. (2024). *Modul Pendidikan Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan* (M. K. Wardaya (ed.)). ISFoRB.

Bagir, Z. A., Hefner, R., & Ali-Fauzi, I. (2014). *Mengelola Keragaman dan Kebebasan Beragama: Sejarah, Teori, dan Advokasi*. Program Studi Agama dan Lintas Budaya, Sekolah Pascasarjana, UGM.

BBC News Indonesia. (2020). *Pemeluk Syiah asal Sampang: Di antara pilihan iman dan harapan pulang - BBC News Indonesia*. BBC News Indonesia on YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=Xss-mwZgCE8

Budi, A. M. S., & Apud, A. (2019). Peran kurikulum kulliyatul mu'allimin al-islamiyah (KMI) gontor 9 dan disiplin pondok dalam menumbuhkembangkan karakter santri. *Tarbawi: Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan*, *5*(1), 1–10.

Cholil, S. (2023). Ketersalinggantungan Islam dan HAM. In N. Hasan (Ed.), *Keberagaman Beragama: Relasi Islam dan HAM* (pp. 21–43). Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga.

Choliq, M., Farkhan, M. A., & Kusumaningrum, A. (2024). Profil Pendidik dan Pengajar Dalam Konsep Gontor. *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*, *4*(9).

Dinningrum, K. M., & Dahliana, Y. (2025). The Concept of Social Justice and Integrity in Testimony according to Islam: A Thematic Study of Surah Al-Maidah Verse 8. *Proceeding ISETH (International Summit on Science, Technology, and Humanity)*, 903–908. https://doi.org/10.23917/iseth.5479

Hasan, N. (2017). Religious diversity and Blasphemy Law: Understanding growing religious Conflict and intolerance in Post-Suharto Indonesia1. *Al-Jami'ah*, *55*(1), 105–126. https://doi.org/10.14421/ajis.2017.551.105-126

Hasse, J., Risakotta, B. A., & Bagir, Z. A. (2011). Diskriminasi Negara Terhadap Agama Di Indonesia, Studi Atas Persoalan Posisi Hukum Towani Tolotang Pasca Pengakuan Agama Resmi. *Jurnal Kawistara*, *1*(2), 180–190. https://doi.org/10.22146/kawistara.3918

Huda, M. N. (2022). Perspective Korban dalam Perspektif Viktimologi. *Voice Justisia: Jurnal*

Hukum Dan Keadilan, *6*(1), 63–69.

Khoiri, A., & Windariana, R. (2019). Islam dan Kekerasan: Perspektif Alquran tentang Persekusi di Indonesia. *Islamuna: Jurnal Studi Islam*, *6*(1), 19. https://doi.org/10.19105/islamuna.v6i1.2210

Madung, O. G. N. (2005). Sejarah dari Perspektif Korban. *Kompas*, 6. http://www.kompas.com/kompas-cetak/0508/01/opini/1928376.htm

Nainggolan, Y. A., Widodo, R., Rahman, & Yuli. (2009). *Pemaksaan Terselubung Hak Atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan*.

Narasi Newsroom. (2022). *Jadi Ahmadiyah: Harta Dijarah & Rumah Dibakar Delapan Kali | Reality Bites*. Narasi Newsroom Channel on Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=t3zZ46vX7RY

Pemerintah Pusat Indonesia. (2019). *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren*.

Ritonga, M., Iswan, I., & Prayitno, I. (2024). 100 Tahun Pendidikan Karakter dan Keteladanan KH Imam Zarkasyi di Pondok Modern Darussalam Gontor. *Islamic Management: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, *7*(1), 1–16.

Setara Institute. (2025). *Kondisi Kebebasan Beragama Berkayakinan (KBB) 2024*. https://setara-institute.org/wp-content/uploads/2025/05/Rilis-Data-KBB-2024-2.pdf

Tsani, N. (2025). *Merancang Klinik dan Advokasi KBB Berbasis Interseksionalitas*. CRCS UGM. https://crcs.ugm.ac.id/merancang-klinik-dan-advokasi-kbb-berbasis-interseksionalitas/

USCIRF. (2019). *Indonesia in Annual Report 2019*..